BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap Pembeli Beritikad Baik diatur dalam Pasal 1977 KUH Perdata, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 251K/Sip/1958 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.
2. Akibat hukum terhadap pembeli beritikad baik dalam transaksi jual beli hak atas tanah yang mengalami kerugian akibat penjual tidak diketahui yaitu Pembeli tidak dapat menguasai hak atas tanah tersebut dimata hukum dan pembeli tidak mempunyai kepastian hukum terhadap tanah tersebut.
3. Solusi terhadap pembeli beritikad baik dalam transaksi jual beli hak atas tanah yang mengalami kerugian akibat penjual tidak diketahui yaitu Pembeli membuat Gugatan perdata ke Pengadilan Negeri dan klausul yang dibuat Pembeli dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menyatakan sah dan berharga bukti yang dimiliki, menghukum penjual telah melakukan wanprestasi, melaksanakan jual beli dengan mengatasnamakan pihak penjual, menghukum penjual untuk membayar Pajak Penghasilan atas Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Memberi Izin PPAT untuk menerbitkan Akta Jual Beli atas objek tersebut, Memerintahkan Kantor Pertanahan untuk melakukan Peralihan Hak Atas Tanah atas Akta Jual Beli tersebut.

B. Saran

1. Dalam kasus penelitian ini Pembeli beritikad baik mengajukan gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri dengan menyertakan alasan-alasan yang disampaikan untuk mendapatkan hak-hak individu dan belum ada putusan terkait kasus penelitian ini.
2. Sebaiknya masyarakat dapat meningkatkan literasi terkait Peralihan hak atas tanah melalui jual beli hal ini bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum terkait hak atas tanah dan untuk meminimalisir permasalahan hukum pada yang akan datang. Dan apabila akan melaksanakan jual beli hak atas tanah harus sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh negara yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa Peralihan hak atas tanah melalui jual beli sebagai syarat dilakukannya pendaftaran tanah maka harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT.
3. Pemerintah dapat meningkatkan akses informasi yang dapat dijangkau dengan mudah dan efisien oleh masyarakat tentang Peralihan hak atas tanah sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi terbaru.